

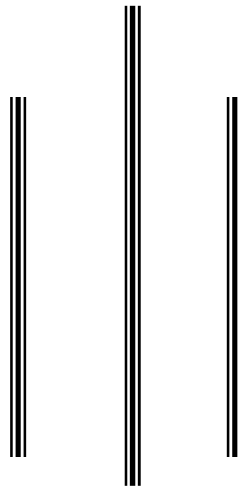


PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN ANGGARAN 2023



BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

KABUPATEN KENDAL

JL. SOEKARNO HATTA NO. 193 KENDAL

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Kendal, dibutuhkan sebuah rencana yang secara komprehensif dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah di Kabupaten Kendal. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam RPJMD Kabupaten Kendal sebagaimana dijabarkan dalam dokumen perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan. Merujuk pernyataan sebelumnya dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kendal harus menyusun RPJMD dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai pedoman perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun anggaran. Penyusunan Renja PD mengacu pada RPJMD 2021-2026, Renstra PD, rancangan awal RKPD serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan periode tahun anggaran sebelumnya untuk proyeksi atas kebutuhan serta dinamika yang akan dihadapi.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Masalah dan dinamika yang dihadapi menjadi acuan perumusan dalam penyusunan rancangan Renja PD sehingga dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang selaras dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan Renja PD dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Baperlitbang, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan dari semua aspirasi yang masuk melalui musrenbang

Kecamatan yang akan ditampung bersamaan dengan usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini merupakan pembahasan usulan–usulan yang masuk, juga merupakan sarana dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan OPD yang bersangkutan khususnya untuk melakukan sinkronisasi terhadap usulan-usulan kegiatan setiap kecamatan yang akan diakomodir dalam program dan usulan kegiatan OPD terkait, disamping reses anggota DPRD, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan, penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Renja PD disusun kemudian ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) melalui Keputusan Bupati yang dikordinir oleh Baperlitbang. Kemudian Renja tersebut juga dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tindak lanjut hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 dimana Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah..

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Masa peralihan ini masih mempedomani RPJMD dan Renstra yang berlaku serta arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2023. Arah kebijakan pada tahun 2023 merupakan arah kebijakan Bupati periode 2021-2026, pada tahun 2026 diharapkan program prioritas Bupati dapat di selesaikan. Pada tahun 2023 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pembangunan aspek “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing , berkarakter, dan Handal”. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan pada tahun 2023 ini adalah “Competitive Kendal

Terdapat beberapa program dan kegiatan prioritas serta rutin yang dilaksanakan oleh BKPP pada tahun 2023 guna menunjang terwujudnya reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai tugas dan fungsi BKPP berpedoman pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Kendal ini adalah mendorong semua unsur yang ada di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal untuk bekerja secara optimal, terpadu, terfokus dan terarah berdasarkan indikasi kebijakan dalam program yang telah ditetapkan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal yang telah terakomodir dalam Renstra Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal.

Tujuan dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan arahan dan panduan bagi penyelenggaraan tertib administrasi kepegawaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023;
2. Menyediakan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023;
3. Memberikan acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dalam menyusun program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
4. Memberikan acuan bagi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal disusun dengan sistematika berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun sistematika Renja sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bagian ini memaparkan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu yang meliputi capaian kinerja dan anggaran program/kegiatan, serta faktor penyebab keberhasilan / kegagalannya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menjelaskan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD.

BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	Bagian ini memaparkan rencana kerja yang meliputi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah pada kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran beserta kebutuhan pendanaannya.
BAB V	PENUTUP

LAMPIRAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan dan kinerja kegiatan pada BKPP Tahun 2021 secara umum selaras dengan rencana kerja tahun 2021 pada BKPP. Evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan penilaian atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.

Hasil evaluasi terhadap Renja BKPP Tahun 2021 menunjukkan tahapan-tahapan realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh capaian output maupun outcome masing – masing program dan kegiatan pada BKPP. Ini dapat dilihat dari terlaksananya semua kegiatan, selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang khususnya di BKPP selaku unit kerja yang terkait tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan .

Monitoring dan evaluasi secara berkala terfokus pada beberapa program/kegiatan prioritas yang terindikasi capaian realisasinya masih rendah. Sebagai penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, tentunya mempunyai konsekuensi bermitra dan kerjasama dengan pihak lain untuk peningkatan kompetensi di Kabupaten Kendal. Hal ini berpengaruh pada tahap perencanaan anggaran terkait dinamika penganggaran dengan kebutuhan insidental/tidak terduga yang sulit diprediksi sebelumnya dan terkait fasilitas pelayanan kepada ASN di bidang kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan. Evaluasi kinerja setiap kegiatan serta kebutuhan rutin pada tahun-tahun sebelumnya, akomodasi terhadap usulan rencana kebutuhan barang yang masuk serta proyeksi cadangan bagi kebutuhan insidental/tidak terduga merupakan unsur terpenting dalam proses penganggaran dengan berpedoman pada setiap peraturan dan kebijakan yang berlaku. BKPP untuk beberapa program/kegiatan lebih mengedepankan outcome atas capaian target kinerja yang telah ditentukan. Proyeksi terhadap alokasi penyediaan juga tidak selalu berbanding lurus dengan kebutuhan yang ada seiring dinamika yang terus berkembang mengikuti mekanisme serta kebijakan yang ada. Sinkronisasi dalam setiap langkah perencanaan menjadi pola rutin karena BKPP Kabupaten Kendal sebagai unsur penunjang mempunyai tugas penting dalam memenuhi dan melayani banyak fungsi di bidang kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di dalam daerah maupun di luar Kabupaten Kendal..

Sebagai catatan khusus bagi pelaksanaan program/kegiatan yang mempunyai capaian realisasi anggaran rendah disamping realisasi fisiknya juga tidak mencapai hasil maksimal, hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang diantaranya meliputi

pedoman hasil kajian stakeholder, kebijakan maupun mekanisme yang tidak memungkinkan untuk direalisasikan sepenuhnya berdasarkan prioritas dan peraturan perundangan yang ada.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2021 diuraikan pada **Lampiran I**.

Secara singkat hasil Kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta administrasi perkantoran di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal.

Pada tahun 2021 ini, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah didistribusikan dalam 7 (tujuh) kegiatan untuk mempermudah penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan fokus dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Kegiatan – kegiatan tersebut meliputi :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah,
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.2 Pelaksanaan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada BKPP Kabupaten Kendal sepanjang Tahun Anggaran 2021 dapat terlaksana dengan baik, terjadwal serta selaras dengan kebutuhan yang ada sebagaimana perencanaan awal sehingga capaian kinerja program/kegiatan dapat terpenuhi dengan baik. Beberapa kegiatan merupakan kegiatan rutin yang diagendakan setiap tahun anggaran guna mewujudkan terselenggaranya roda pemerintahan, yang meliputi jasa pelayanan dalam bentuk penyediaan akomodasi/fasilitas fisik sarana prasarana serta nonfisik tatakelola administrasi ketatausahaan di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal demi tercapainya sasaran peningkatan kinerja pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.

– Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pagu anggaran	:	Rp.	41.868.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	37.316.800,-
Realisasi anggaran (%)	:		89,13
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	
Target capaian kegiatan	:	4 dokumen	
Realisasi capaian kegiatan	:	4 dokumen	

Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 6.242.646.369,-
Realisasi anggaran : Rp. 5.753.386.277,-
Realisasi anggaran (%) : 92,16
Indikator kinerja capaian : Prosentase terlaksananya administrasi keuangan
keluaran kegiatan perangkat daerah
Target capaian kegiatan : 100 persen
Realisasi capaian kegiatan : 100 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 89.623.000,-
Realisasi anggaran : Rp. 86.370.200,-
Realisasi anggaran (%) : 96,37
Indikator kinerja capaian : Prosentase terlaksananya administrasi
keluaran kegiatan kepegawaian perangkat daerah
Target capaian kegiatan : 100 persen
Realisasi capaian kegiatan : 100 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 437.540.201,-
Realisasi anggaran : Rp. 423.370.242,-
Realisasi anggaran (%) : 96,76
Indikator kinerja capaian : Prosentase tersedianya kebutuhan rutin kantor
keluaran kegiatan
Target capaian kegiatan : 100 persen
Realisasi capaian kegiatan : 100 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu anggaran : Rp. 258.693.200,-
Realisasi anggaran : Rp. 241.909.000,-
Realisasi anggaran (%) : 93,15
Indikator kinerja capaian : Prosentase tersedianya kebutuhan sarana
keluaran kegiatan prasarana kantor
Target capaian kegiatan : 100 persen
Realisasi capaian kegiatan : 100 persen
Tingkat capaian kinerja (%) : 100,00

– **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu anggaran : Rp 76.964.000
Realisasi anggaran : Rp 65.904.922
Realisasi anggaran (%) : 85,83
Indikator kinerja capaian : Prosentase tersedianya jasa penunjang
keluaran kegiatan perkantoran
Target capaian kegiatan : 100 persen

Realisasi capaian kegiatan	:	100 persen
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00

– **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Pagu anggaran	:	Rp.	76.100.000,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	75.897.793,-
Realisasi anggaran (%)	:		99.73
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:		Prosentase terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran
Target capaian kegiatan	:		100 persen
Realisasi capaian kegiatan	:		100 persen
Tingkat capaian kinerja (%)	:		100,00

1.3. Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sepanjang tahun anggaran 2021 adalah tercapainya 100% kinerja program yaitu prosentase unit kerja internal yang terlayani melalui penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran pada unit kerja di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal dapat terealisasi sesuai perencanaan secara fisik maupun serapan anggaran sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. tujuh kegiatan yang menjabarkan program penunjang urusan pemerintah daerah dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal.

2. Program Kepegawaian Daerah

Di tahun 2021 Program Kepegawaian Daerah didistribusikan dalam 4 (empat) kegiatan untuk memudahkan penganggaran dan pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan fokus dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

- Kegiatan – kegiatan tersebut meliputi :
 - Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN,
 - Mutasi dan Promosi ASN,
 - Pengembangan kompetensi ASN,
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur,

2.1. Pelaksanaan

Pelaksanaan program Kepegawaian Daerah selama Tahun Anggaran 2021 meliputi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan ASN sampai dengan purna tugas yang terencana, prioritas dan efektif sesuai dengan fungsi dan manfaat. Selain itu, agar kualitas yang ada tetap terjaga maka dilaksanakan pula kegiatan yang bersifat evaluasi pengadaan ASN. Dengan demikian, proses dari perencanaan sampai dengan perekrutan dapat berlangsung dengan baik sesuai regulasi yang berlaku. Serangkaian kegiatan tersebut sepanjang tahun anggaran 2021 juga telah dilaksanakan dengan

baik mengacu pada rencana kerja yang telah terjadwal, skala prioritas serta kebutuhan operasional yang sudah dialokasikan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan yang masih terhambat pada semester I masih dapat terealisasi dengan baik pada semester II karena jadwal serta tahapan pelaksanaan terus dievaluasi, diselaraskan dan dimonitor dengan lebih intens. Secara umum kegiatan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana perencanaan awal sehingga capaian kinerja program/kegiatan dapat terpenuhi dengan baik.

Pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dimaksudkan untuk mewujudkan kelancaran dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran dan menunjang operasional tugas-tugas kedinasan di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal khususnya yang mendukung peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian.

– **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN**

Pagu Anggaran	:	Rp.	3.449.981.793,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	1.827.400.212,-
Realisasi anggaran (%)	:		52,97
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan data dan Informasi kepegawaian yang terproses dan diperbarui Jumlah laporan terlaksana pengadaan, pemberhentian ASN	
Target capaian kegiatan	:	12 laporan 12 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	:	12 laporan 12 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00	

– **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

Pagu anggaran	:	Rp.	1.004.376.040,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	449.333.163,-
Realisasi anggaran (%)	:		44,74
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan terlaksana mutasi (internal Perangkat Daerah dan Luar Kabupaten) dan Kenaikan Pangkat ASN	
Target capaian kegiatan	:	12 dokumen	
Realisasi capaian kegiatan	:	12 dokumen	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00	

– **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**

Pagu anggaran	:	Rp.	21.200.970,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	9.511.149,-
Realisasi anggaran (%)	:		44,86
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	
Target capaian kegiatan	:	4 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	:	4 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	:	100,00	

– **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Pagu anggaran	:	Rp.	294.483.700,-
Realisasi anggaran	:	Rp.	270.338.773,-
Realisasi anggaran (%)	:		91,8
Indikator kinerja capaian keluaran kegiatan	:		Jumlah laporan penilaian prestasi kerja dan PNS yang berprestasi
Target capaian kegiatan	:		2 laporan
Realisasi capaian kegiatan	:		2 laporan
Tingkat capaian kinerja (%)	:		100,00

2.3. Hasil yang dicapai

Hasil dari pelaksanaan program Kepegawaian Daerah sepanjang Tahun Anggaran 2021 adalah prosentase 100% dari semua kegiatan yang ada, serta dapat terealisasi sesuai target capaian meskipun secara serapan anggaran terkendala karena faktor eksternal contohnya Kegiatan Pengadaan ASN dimana jumlah pendaftar yang diprediksi 9000 an pelamar ternyata hanya 3000 an pelamar. Empat kegiatan yang menjabarkan program Kepegawaian Daerah dapat berjalan dengan baik sebagai penunjang peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi khususnya di lingkungan BKPP Kabupaten Kendal.

3. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dilaksanakan oleh BKPP Kabupaten Kendal mencakup 2 (dua) kegiatan yaitu Peningkatan Kompetensi Teknis yang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas serta akomodasi bagi pegawai di lingkungan Kabupaten Kendal guna meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal melalui pelatihan-pelatihan maupun bimbingan teknis selaras dengan tugas dan fungsi kedinasan, demi menunjang terwujudnya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat di lingkungan Kabupaten Kendal. Sedangkan Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional bertujuan untuk memberikan fasilitasi peningkatan kompetensi ASN Struktural dan Fungsional.

3.1. Pelaksanaan

Pelaksanaan Program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Tahun Anggaran 2021 berjalan sangat baik sesuai dengan perhitungan dan perencanaan ulang berdasarkan dinamika serta kebutuhan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Kendal, sehingga manfaat dan hasilnya mampu melebihi target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja pelayanan masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal serta demi mewujudkan tujuan dari misi yang ada yaitu reformasi birokrasi di Pemerintahan Kabupaten Kendal.

– **Kegiatan Peningkatan Kompetensi Teknis**

Pagu anggaran	: Rp.	754.317.990,-
Realisasi anggaran	: Rp.	577.216.069,-
Realisasi anggaran (%)	: 76,52	
Indikator kinerja capaian	: Prosentase ASN yang lulus pengembangan keluaran kegiatan	kompetensi yang telah direncanakan
Target capaian kegiatan	: 100 %	
Realisasi capaian kegiatan	: 100 %	
Tingkat capaian kinerja (%)	: 100 %	

– **Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**

Pagu anggaran	: Rp	2.161.771.300
Realisasi anggaran	: Rp	2.114.875.473
Realisasi anggaran (%)	: 97,83	
Indikator kinerja capaian:	Jumlah laporan dan pengembangan kompetensi keluaran kegiatan	manajerial dan fungsional ASN
Target capaian kegiatan	: 2 laporan	
Realisasi capaian kegiatan	: 2 laporan	
Tingkat capaian kinerja (%)	: 100 %	

3.2. Hasil yang dicapai

Hasil capaian dari pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yaitu 100% kesesuaian standar ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan selaras dengan kompetensi/tugas fungsi yang didukung ketersediaan fasilitas serta akomodasi yang ada. Sedangkan kelompok sasaran dari pelaksanaan program tersebut adalah aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Kendal yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, kompetensi serta profesionalitas diri sesuai kepentingan tugas dinasnya masing-masing. Dengan fasilitas tersebut diharapkan aparatur dapat menunjukkan kualitas kinerja yang tepat guna, bertanggung jawab dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sebagai wujud komitmen seorang aparatur pemerintahan yang berdedikasi tinggi terhadap kinerja pekerjaannya serta pelayanannya kepada publik/masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal sesuai dengan pelaksanaan Renja tahun lalu (2021) merupakan unsur dari Organisasi Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, BKPP mempunyai kedudukan sebagai fungsi penunjang unsur pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas dalam perumusan kebijakan teknis, koordinasi

dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas.

Kepala BKPP dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang yaitu Bidang Perencanaan Pengangkatan dan Mutasi Pegawai, Bidang Pengembangan Kompetensi ASN serta Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Data Pegawai yang masing-masing menjalankan sebagian tugas Kepala BKPP.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, fungsi BKPP guna melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Umum dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tidak memiliki aturan khusus mengenai SPM (Standar Pelayanan Minimal) dikarenakan tidak langsung terkait pelayanan publik ke masyarakat. Namun tolok ukur kinerjanya tetap berpedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) serta kebijakan yang berlaku demi terwujudnya pelayanan yang prima guna menunjang keberhasilan program/kegiatan yang ada, mewujudkan pelayanan publik disamping memenuhi ketertiban dalam mengelolaketatausahaan. Selama ini kesiapan serta ketepatan waktu selalu menjadi prioritas utama pelayanan yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal. Baik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkup internal maupun di luar Kabupaten.

Evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja program dan kegiatan yang ada pada BKPP Kabupten Kendal Tahun 2021 secara umum memperlihatkan hasil kinerja optimal dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Ini dapat dilihat dari terlaksananya semua kegiatan, terpenuhinya outcome kegiatan, dapat menunjang capaian program pembangunan daerah serta selaras dengan dinamika situasi dan kondisi yang berkembang utamanya di lingkungan Sekretariat Daerah selaku unit kerja pelayanan publik, penyedia serta penunjang kegiatan.

Rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal difokuskan pada perwujudan reformasi birokrasi dan

pelayanan prima khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah serta pelayanan terhadap pimpinan daerah.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPP Tahun 2021

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	12	13
Indikator Kinerja Utama									
A.	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja		42,66	42,67	42,70	42,72	40,94	42,67	95,96%
	Dimensi Kompetensi		33	33,62	34	34	11,8	33,62	35,75%
	Nilai SAKIP		73	74	75	76			
Indikator Kinerja Kunci									
I.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	210	210	215	215	265,59	270	126,47%
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	8,09	8,09	8,11	8,11	12,94	13,00	159,95%
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	-	23,21	23,22	23,23	23,24	42,61	43,00	183,58%
Indikator Program									
1	Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update	-	61	70	75	80	61	70	100%
2	Tingkat Kedisiplinan ASN	-	97,3	97,6	97,9	98,2	97,3	97,6	100%

No	IKU/IKK/Indikator Program	SPM/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Capaian Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	12	13
3	Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu	-	60	65	70	80	60	65	100%
4	Persentase jabatan struktural yang dievaluasi	-	82	85	87	90	82	85	100%
5	Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan	-	60	62	65	70	60	62	100%
6	Persentase struktur jabatan ASN yang terisi	-	80	82	85	87	92,4	94,5	100%
7	Persentase ASN yang lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	-	100	100	100	100	100	100	100%
8	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan		100	100	100	100	100	100	
9	Persentase ASN yang lulus lat prajabatan/latsar dan lat kepemimpinan		100	100	100	100	100	100	
10	Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	
11	Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		100	100	100	100	100	100	

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal Tahun 2021 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Skor)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja	Nilai Disiplin + Dimensi Kinerja + Dimensi Kualifikasi IP ASN	42,66
2	Dimensi Kompetensi	Nilai Kompetensi IP ASN	33
3	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	73

Dari perbandingan target dan realisasi tahun 2021 serta perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun 2020 dan tahun 2021 terlihat bahwa Tahun 2021 pada beberapa indikator mengalami penurunan.

- Capaian sasaran Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja dengan indikator Nilai Disiplin + Dimensi Kinerja + Dimensi Kualifikasi IP ASN sebesar 40,17 dari target 42,66, persentase capaian 94,16 % (sangat baik).
- Capaian sasaran Dimensi Kompetensi, capaian indikator sasaran Nilai Kompetensi IP ASN sebesar 9,25 dari target 33, persentase capaian 28,03 % (sangat rendah).
- Capaian Sasaran Nilai SAKIP dengan indikator Nilai SAKIP 72,54 dari target 73. persentase capaian 99,36 % (sangat tinggi)

2.3 Isu- isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Sedangkan, isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa

depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal lima tahun mendatang.

Dari beberapa masalah utama daerah kemudian dijabarkan ke dalam permasalahan dan akar masalah yang lebih spesifik. Keterkaitan masalah utama dengan masalah dan akar masalah adalah bahwa suatu permasalahan utama adalah masalah daerah yang penyelesaiannya harus membutuhkan peran lintas bagian maupun bidang urusan, kemudian dari permasalahan utama tersebut dicari penyebabnya. Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal yang belum terwujud, salah satu faktor masalah utama daerah dapat diidentifikasikanyaitu Belum Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berdasarkan tugas fungsinya pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, sesuai Peraturan Bupati Kendal Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, masalah utama BKPP Kabupaten Kendal yang dapat diidentifikasi yaitu terkait Pelayanan publik yang belum maksimal. Dari permasalahan utama tersebut dicari akar masalahnya berdasarkan tugas fungsi pada BKPP Kabupaten Kendal, yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitas sarana dan prasarana penunjang penunjang urusan pemerintah daerah.
2. Terbatasnya kualitas serta kuantitas SDM;
3. Belum optimalnya perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap tugas dan fungsi pada BKPP Kabupaten Kendal, permasalahan, akar masalah serta kebijakan – kebijakan yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan didapatkan formulasi yang mengangkat isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Menjadi isu penting yang harus dihadapi BKPP Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang representatif;
- b. Penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi pelayanan publik;
- c. Pengadaan SDM serta peningkatan kualitas & kompetensi SDM;
- d. Penerapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
- e. Fasilitasi dan inovasi pelayanan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja BKPP Kabupaten Kendal Tahun 2021 menyelaraskan dari tahapan-tahapan rancangan awal RKPD 2021 yang penyusunannya tidak terlepas dari pedoman Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal 2021-2026 serta perbaikan – perbaikan indikator kinerja tahun 2021 yang merupakan tahun pertama RPJMD 2016-2021.

Terdapat proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang merupakan sinkronisasi dari dinamika yang berkembang di lingkungan BKPP Kabupaten Daerah, hal ini tidak lepas dari tugas dan fungsi BKPP Kabupaten Kendal sebagai OPD yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Tabel 2.2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021

No,	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		- Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100 %	8,269,271,168	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		- Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah		7.223.252.770	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	4 dokumen	42.830.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	4 dokumen	41.686.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.463.240.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	6.242.646.369	Dinamika penyediaan
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	611.733.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	89.623.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase tersedianya kebutuhan rutin kantor	100 %	927.312.168	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase tersedianya kebutuhan rutin kantor	100 %	437.540.201	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase tersedianya kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %	36.968.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase tersedianya kebutuhan sarana prasarana kantor	100 %	258.693.200	Dinamika kebutuhan sarana prasarana kantor
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase tersedianya jasa penunjang perkantoran	100 %	100.478.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase tersedianya jasa penunjang perkantoran	100 %	76.964.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100 %	86.710.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	100 %	76.100.000	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
II	Program Kepegawaian Daerah		- Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update	61 %	3,991,722,520	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		- Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update	61 %	4.770.042.503	

No,	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	4	3	5	6	2	4	3	5	6	8
8	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	-Jumlah laporan data dan Informasi kepegawaian yang terproses dan diperbarui -Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, pemberhentian ASN	12 laporan 12 laporan	2.515.981.720	Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	-Jumlah laporan data dan Informasi kepegawaian yang terproses dan diperbarui -Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, pemberhentian ASN	12 laporan 12 laporan	3.449.981.793	Dinamika untuk pengadaan ASN 2021
9	Mutasi dan Promosi ASN	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan terlaksananya mutasi (internal Perangkat Daerah dan Luar Kabupaten) dan Kenaikan Pangkat ASN	12 dokumen	884.140.200	Mutasi dan Promosi ASN	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan terlaksananya mutasi (internal Perangkat Daerah dan Luar Kabupaten) dan Kenaikan Pangkat ASN	12 dokumen	1.004.376.040	Dinamika Selter dan Evaluasi JPT
10	Pengembangan Kompetensi ASN	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	4 laporan	94.645.000	Pengembangan Kompetensi ASN	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	4 laporan	21.200.970	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
11	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan penilaian prestasi kerja dan PNS yang berprestasi	2 laporan	473.069.000	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan penilaian prestasi kerja dan PNS yang berprestasi	2 laporan	294.483.700	Penyesuaian/Rasionalisasi belanja
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		- Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan	100 %	4,233,455,500	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		- persentase Perangkat Daerah Pelayanan Yang Indeks IKMnya Baik (Persen)	95	2.916.09.290	
12	Peningkatan Kompetensi Teknis	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan	100 %	66.550.000	Peningkatan Kompetensi Teknis	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Prosentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan	100 %	754.317.990	Penyesuaian Belanja
13	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN	2 laporan	4,166,905,500	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	KABUPATEN KENDAL (BKPP)	Jumlah laporan dan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN	2 laporan	2.161.771.300	Penyesuaian Belanja
	Jumlah				16,494,449,188	Jumlah				14.909.296.563	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Arah kebijakan pada tahun 2021, pembangunan Kabupaten Kendal berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan keberlanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan-kebijakan pembangunan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemerataan pembangunan infrastruktur masih dilanjutkan pada tahun 2021, di samping fokus pembangunan di tahun 2021 itu sendiri. Pada tahun 2021 pembangunan Kabupaten Kendal menitikberatkan pada aspek pemulihan ekonomi, kesehatan, sosial dan infrastruktur. Berdasarkan hal tersebut maka tema pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2021 adalah "KENDALMANDIRI". Selain itu, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2021 ini juga masih melaksanakan arah kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam rangka persiapan menunjang capaian visi misi RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten Kendal bekerja mewujudkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Sehingga RPJMD bisa selaras dan tidak ada penyimpangan dengan apa yang telah direncanakan oleh daerah sesuai dengan kondisi wilayah. Pada periode yang ketiga ini, dari mulai pelaksanaan musrenbangdesa, musrenbang kecamatan sampai musrenbang kabupaten diwujudkan guna menyelaraskan antara desa, kecamatan dan kabupaten dengan program kerja provinsi dan pusat sesuai dengan Nawacita. Apa yang dibahas dalam musrenbang tidak bisa meninggalkan slogan Jawa Tengah "Jateng Gayeng". Semua ini dipersiapkan bersama tim yang dimulai dengan desk masing - masing (pemerintahan, infrastruktur dan sosial budaya) pembahasan bersama dan tokoh - tokoh akan berbicara baik itu dari Perguruan Tinggi, swasta, tokoh masyarakat, tokoh agama.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat merupakan hasil aspirasi dalam forum musrenbang dengan memperhatikan tugas dan fungsi, rencana strategis masing-masing Perangkat Daerah serta isu – isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut bila ada dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun rancangan Renja BKPP Kabupaten Kendal yang nantinya dibahas dalam forum Perangkat Daerah yang dikoordinasi oleh Baperlitbang. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program/kegiatan, tugas dan fungsi serta penajaman indikator dan target kinerja program/kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi khususnya di BKPP Kabupaten Kendal.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap usulan aspirasi masyarakat pada Musrenbang tahun ini terdapat usulan - usulan program dan kegiatan yang dimintakan masyarakat sebagai aspirasi maupun koreksi kepada beberapa Perangkat Daerah terkait agar diperoleh kesepakatan dalam merencanakan program-program pembangunan yang sifatnya strategis dan bermanfaat bagi

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di daerah sehingga program yang direncanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Dalam penyusunan usulan Renja kali ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal tidak mendapat usulan aspiratif dari hasil musrenbang dan reses anggota DPRD untuk tahun anggaran 2021, namun BKPP Kabupaten Kendal tetap mengajukan usulan program-program kegiatan lain yang sifatnya strategis dan bermanfaat guna menunjang peningkatan di bidang kepegawaian dan peningkatan Sumber Daya Manusia ASN yang lebih baik dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan reformasi birokrasi,. Disamping perlunya strategi serta kebijakan khusus pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal sebagai lini pendukung kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di daerah, diharapkan pemerintahan yang terbentuk di Kabupaten Kendal mampu berpandangan jauh ke depan (visioner), transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, demokratis, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi pada pengurangan berbagai kesenjangan yang terjadi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan Nasional adalah pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana Nasional pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga periode RPJMN 2020-2024, mempunyai tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Untuk itu, skala prioritas pembangunan akan berfokus pada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana. Sejalan dengan hal tersebut, arahan Presiden untuk penyusunan RKP 2021,

memuat 7 Agenda Pembangunan yang akan dilaksanakan di tahun 2023, yaitu :

1. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. SDM berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

• Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 adalah “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”.

Prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

• Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2023

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan

meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.

Tabel 3.1.

Persandingan Arah Kebijakan s/d Penyusunan Program/Kegiatan Renja 2023 BKPP Kabupaten Kendal

Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Nasional)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Provinsi)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan/Program Prioritas/Fokus (Daerah)	Pokok Pikiran DPRD	Program/Kegiatan (Belanja Langsung) dalam Renja 2023 (PMDN 13/2006 dan Renstra 2021-2026)
"Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial"	Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran			
	Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdaya;			
3) SDM berkualitas dan Berdaya Saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing	"Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal"		Program Kepegawaian Daerah
		Mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0.		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Nasional)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan (Provinsi)	Arah Kebijakan/Prioritas Pembangunan/Program Prioritas/Fokus (Daerah)	Pokok Pikiran DPRD	Program/Kegiatan (Belanja Langsung) dalam Renja 2023 (PMDN 13/2006 dan Renstra 2021-2026)
7) Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan akses dan kualitas layanan publik		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Kendal yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal bertanggungjawab atas pelaksanaan misi 5 yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.**

Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal tersebut, tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TAHUN 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
					2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN	Meningkatnya kualifikasi, kinerja dan tingkat kedisiplinan ASN	Jumlah Nilai Dimensi Disiplin, Dimensi Kualifikasi dan Dimensi Kinerja	skor	42,70
2	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN	Meningkatnya kompetensi ASN	Nilai Dimesi Kompetensi	skor	34
3	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN	Meningkatnya kualifikasi, kinerja dan tingkat kedisiplinan ASN	Nilai SAKIP	Skor	75

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang tercantum dalam RKPD Tahun 2023, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal merumuskan program prioritas sebagai berikut :

1. Pengembangan Karir Berbasis Sistem Merit;
2. Pengembangan Kompetensi Teknis ASN;
3. Peningkatan Penguasaan IT, Spiritual dan Bahasa Asing;
4. Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Kepemimpinan ASN.

Berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah tidak terdapat usulan kegiatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal hasil reses maupun usulan kegiatan dari kecamatan. Sedangkan kegiatan yang diusulkan masing-masing bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat menangani program dan kegiatan rutin yang ada pada setiap perangkat daerah, meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.3.1 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.4.1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.4.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :

- 1.5.1 Pengadaan Mebel
- 1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.7.2 Pemeliharaan Mebel
 - 1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai

Usulan program, kegiatan dan subkegiatan bidang Pengembangan Kompetensi dan Karir Pegawai adalah :

1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Mutasi dan Promosi ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Pengelolaan Mutasi ASN
 - 1.2 Pengembangan Kompetensi ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 1.3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.3.1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1.3.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
2. Program Pengembangan Sumberdaya Manusia terdiri dari kegiatan:
 - 2.1 Pengembangan Kompetensi Teknis, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 2.1.1 Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 2.1.2 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
 - 2.2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.3.1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

- 1.3.2 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan

3 Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai

Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan dari Bidang Perencanaan, Pengangkatan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :

- 1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
 - 1.1.2 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
 - 1.1.3 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - 1.1.4 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
 - 1.2 Mutasi dan Promosi ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1 Pengelolaan Mutasi ASN
 - 1.2.2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
 - 1.3 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.3.1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1.3.2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

3. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai

Usulan Program dan Kegiatan dari Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Data Pegawai terdiri dari program :

- 1. Program Kepegawaian Daerah terdiri dari kegiatan:
 - 1.1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.1.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - 1.1.2 Pengelolaan Data Kepegawaian
 - 1.2 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, yang terdiri dari subkegiatan :
 - 1.2.1 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1.2.2 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
 - 1.2.3 Pembinaan Disiplin ASN
 - 1.2.4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Secara keseluruhan pada tahun anggaran 2023 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal merencanakan 3 (tiga) program, 13 (tiga)

belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Kendal. Total dana yang dibutuhkan untuk 42 (empat puluh dua) sub kegiatan kegiatan tersebut sebesar Rp. 13.977.947.724 (Tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).

Perincian kebutuhan dana pada tiap kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Renja ini.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Rencana Kerja BKPP Kabupaten Kendal adalah Program dan kegiatan Tahunan yang sesuai dengan Tugas dan fungsi serta sasaran Program BKPP Kabupaten Kendal. Rencana Kerja BKPP Kabupaten Kendal selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BKPP Kabupaten Kendal. Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Inspektorat Kabupaten Kendal. Selain itu RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Inspektorat Kabupaten Kendal sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dengan telah disepakati dan ditetapkannya dokumen perencanaan berupa RENJA-OPD, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renja-OPD ini sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan evaluasi kinerja OPD;
2. Program dan kegiatan selaras dengan system perencanaan dan penganggaran, maka program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Renja-OPD akan dilakukan perubahan sebagaimana perlunya guna penyesuaian dengan RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 manakala terjadi revisi sebagai akibat penyesuaian dengan hasil evaluasi .

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan

berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Kendal, Juli 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KABUPATEN KENDAL**



WAHYU HIDAYAT, S.H, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 199203 1 005

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif						
										Nasional	Daerah									
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03							9,375,247,724						11,465,820,000						
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	6,128,702,724				100 persen	7,779,070,000			
5	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	19,000,000				4 dokumen	19,000,000			
5	03	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	4,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	2 dokumen	4,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 laporan	15,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	2 laporan	15,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya adminstrasi keuangan perangkat daerah	persen		persen	100 persen	5,357,414,798						100 persen	6,760,000,000	
5	03	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 orang/bulan	5,117,414,798	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab Kendal	48 orang/bulan	6,500,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Dokumen	240,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konduktivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab Kendal	4 Dokumen	260,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5	03	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen		persen	100 persen	25,000,000						100 persen	75,000,000	

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	25,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kendal	70 Orang	25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan rutin perkantoran	persen		persen	100 persen	534,834,926						100 persen	613,000,000	
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	72,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	3 Paket	72,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	49,571,350	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	2 Paket	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	33,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	12 Paket	33,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	31,450,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	3 Paket	35,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				4 Dokumen	3,800,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	4 Dokumen	4,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				224 Laporan	326,013,576	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	224 Laporan	400,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	19,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	1 Dokumen	19,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	persen		persen	100 persen	62,100,000						100 persen	187,000,000	
5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	10,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	1 Paket	18,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 unit	52,100,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	6 unit	169,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang perkantoran	persen		persen	100 persen	55,442,000						100 persen	33,070,000	
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	12 Laporan	7,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11,851,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	12 Laporan	18,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	7,623,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	12 Laporan	8,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	28,968,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	12 Laporan	70,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	persen		persen	100 persen	74,911,000						100 persen	92,000,000	
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				30 unit	47,767,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	30 unit	50,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				8 unit	4,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	8 unit	4,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 unit	17,144,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	24 unit	18,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				24 unit	6,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN BKPP Kab. Kendal	24 unit	20,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian dalam aplikasi kepegawaian yang ter update Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen persen persen		persen persen persen	75 persen 75 persen 210 persen	3,246,545,000						75 persen 75 persen 210 persen	3,686,750,000	
5 03 02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan data dan informasi kepegawaian yang terproses dan diperbarui Jumlah Laporan terlaksananya pengadaan, pemberhentian ASN	Laporan Laporan		Laporan Laporan	12 Laporan 12 Laporan	1,917,795,000						12 Laporan 12 Laporan	2,312,000,000	
5 03 02 2.01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 dokumen	59,724,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	1 dokumen	60,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	1,625,630,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	2 Dokumen	2,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	22,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	1 Laporan	27,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				521 Dokumen	66,441,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	521 Dokumen	61,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 dokumen	130,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	1 dokumen	150,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				3500 dokumen	14,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	3500 dokumen	14,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah laporan promosi PNS	Laporan		Laporan	4 Laporan	1,059,000,000						4 Laporan	1,064,000,000	
5 03 02 2.02 01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				12 dokumen	9,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	12 dokumen	9,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1200 Dokumen	55,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	1200 Dokumen	55,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Jumlah peserta uji kompetensi ASN Jumlah peserta Uji Kompetensi Selter JPT				0 Dokumen 4 Dokumen 60 Orang 45 Orang	995,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	0 Dokumen 4 Dokumen 60 Orang 45 Orang	1,000,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN	Laporan		Laporan	4 Laporan	40,000,000						4 Laporan	40,000,000	
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				110 Orang	40,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	110 Orang	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan Penilaian Prestasi Kerja dan PNS yang berprestasi	Laporan		Laporan	2 Laporan	229,750,000						2 Laporan	270,750,000	
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	40,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	4 Dokumen	40,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	11,750,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	1 Dokumen	11,750,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	7,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	2 Dokumen	7,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				2 orang	80,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	2 orang	120,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				70 Laporan	66,441,000	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	70 Laporan	67,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				12 Laporan	24,559,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN Pemerintah Kabupaten Kendal	12 Laporan	25,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						4,602,700,000						4,770,034,750		
5 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 persen		100 persen	100 100 23,23 persen	4,602,700,000						100 100 23,23 persen	4,770,034,750	
5 04 02 2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi yang telah direncanakan	persen		persen	100 persen	864,200,000						100 persen	868,000,000	
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 dokumen	18,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN PEMKAB KENDAL	1 dokumen	18,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				216 Orang	846,200,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN PEMKAB KENDAL	216 Orang	850,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN	Laporan		Laporan	2 Laporan	3,738,500,000						2 Laporan	3,902,034,750	
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang lulus Pendidikan Kepemimpinan Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Fungsional Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				81 Orang 83 Orang 0 Laporan 2 laporan	3,700,000,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN PEMKAB KENDAL	81 Orang 83 Orang 0 Laporan 2 laporan	3,742,034,750	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				1 Dokumen	38,500,000	Kab. Kendal, Kendal, Pegulon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintah yang yang demokratis, transparan, akuntabel dan partisipatif serta kondutivitas daerah yang baik, harmonis	ASN PEMKAB KENDAL	1 Dokumen	160,000,000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TOTAL							13,977,947,724							16,235,854,750	

**FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kabupaten Kendal
s/d TRIWULAN 4 TAHUN 2021**

FORMULIR
s/d

No	Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra OPD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD sampai dengan Renja OPD Tahun Lalu (Tahun 2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan (Tahun 2021) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2021 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2021 (%)		Unit OPD Penanggung jawab	Ket
						5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 127 x 100%			14 = 6 + 12		15 = 14/5 x 100%			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			0	0	0	0	6.445.609.693	0	188.671.690	0	429.560.883	0	1.572.472.733	0	4.831.989.239	0	4831989239	0	74,97	0	0	0	0				
5.03			KEPEGAWAIAN			0	0	0	0	2.809.351.673	0	179.417.690	0	253.152.883	0	595.282.833	0	2.896.558.617	0	2896558617	0	103,1	0	0	0	0				
1.5.03-02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			0	0	0	0	2.809.351.673	0	179.417.690	0	253.152.883	0	595.282.833	0	2.896.558.617	0	2896558617	0	103,1	0	0	0	0				
				Persentase data kepegawain dalam aplikasi kepegawain yang ter update	persen	90	0	0	0	61	0	0	0	0	0	0	0	61	0	61	0	0	0	0	0	0				
				Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	225	0	0	0	210	0	0	0	0	0	0	189,92	0	189,92	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Tingkat Kedisiplinan ASN	persen	98,8	0	0	0	97,3	0	0	0	0	0	0	97,3	0	97,3	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Persentase ASN menyusun SKP dan Penilaian Prestasi Kerja tepat waktu	persen	90	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Persentase jabatan struktural yang dievaluasi	persen	100	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Persentase penempatan ASN sesuai peta jabatan	persen	80	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Persentase struktur jabatan ASN yang terisi	persen	88	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	92,4	0	92,4	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	persen	8,13	0	0	0	8,09	0	0	0	0	0	8	0	12,95	0	20,95	0	0	0	0	0	0	0			
				Persentase ASN yang lulus Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Ujian Kenaikan Pangkat Ijazah	persen	100	0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0			
5.03-02.2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN			0	0	0	0	1.098.033.493	0	46.417.290	0	69.154.440	0	225.749.240	0	1.721.230.212	0	1721230212	0	156,76	0	0	0	0	0			
				Jumlah Laporan data dan informasi kepegawain yang terproses dan diperbarui	Laporan	12	0	0	0	12	0	3	0	3	0	3	0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Laporan terlaksananya pengadaan, pemberhentian ASN	Laporan	4	0	0	0	4	0	1	0	1	0	1	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0			
5.03-02.2.01.02			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			0	0	0	0	43.066.640	0	6.390.000	0	17.321.550	0	18.191.550	0	31.622.902	0	31622902	0	73,43	0	0	0	0	0			
				Jumlah Dokumen kebutuhan ASN	Dokumen	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
5.03-02.2.01.03			Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			0	0	0	0	792.931.980	0	33.144.390	0	33.144.390	0	180.781.890	0	1.425.298.310	0	1425298310	0	179,75	0	0	0	0	0			
				Jumlah laporan terprosesnya Nomor Induk Pegawai dan Nomor Induk P3K	laporan	2	0	0	0	3	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah laporan terselenggaranya seleksi ASN	laporan	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0			
5.03-02.2.01.04			Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			0	0	0	0	17.970.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah laporan terselenggaranya sumpah janji ASN	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah Laporan terprosesnya pangangkatan CPNS menjadi PNS	Laporan	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
5.03-02.2.01.06			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			0	0	0	0	70.666.962	0	1.620.000	0	2.366.000	0	4.918.300	0	21.677.200	0	21677200	0	30,68	0	0	0	0	0			
				Jumlah laporan terselenggaranya pembekalan purna tugas PNS	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Jumlah SK Pensiun yang terbit	Surat Keputusan	450	0	0	0	450	0	118	0	113	0	122	0	144	0	497	0	0	0	0	0	0	0			
5.03-02.2.01.10			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain			0	0	0	0	148.764.290	0	1.436.500	0	6.875.600	0	11.435.600	0	221.906.600	0	221906600	0	149,17	0	0	0	0	0			

5.04-02.2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			0	0	0	0	0	21.200.970	0	0	0	0	170.200	0	9.511.149	0	9511149	0	44,86	0	0	0	0		
			Jumlah dokumen data kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	Dokumen	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
5.04-02.2.01.01		Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			0	0	0	0	0	21.200.970	0	0	0	0	170.200	0	9.511.149	0	9511149	0	44,86	0	0	0	0		
			Jumlah dokumen data kebutuhan pengembangan kompetensi ASN	Dokumen	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
5.04-02.2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			0	0	0	0	0	3.615.057.050	0	9.254.000	0	176.408.000	0	977.019.700	0	1.925.919.473	0	1925919473	0	53,27	0	0	0		
			Jumlah laporan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional ASN	Laporan	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.04-02.2.02.07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			0	0	0	0	0	3.581.140.250	0	9.254.000	0	176.408.000	0	977.019.700	0	1.894.077.773	0	1894077773	0	52,89	0	0	0		
			Jumlah laporan CPNS yang mengikuti dan lulus pelatihan dasar	persen	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah laporan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	laporan	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.04-02.2.02.08		Penilaian, Pengoortnasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional			0	0	0	0	0	33.916.800	0	0	0	0	0	0	0	31.841.700	0	31841700	0	93,88	0	0	0		
			Jumlah laporan terselenggaranya Pameran Inovasi Kepemimpinan	Laporan	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
X					0	0	0	0	0	7.375.540.599	0	829.762.248	0	2.501.129.143	0	3.805.985.878	0	5.013.678.524	0	5013678524	0	67,98	0	0	0		
X.XX					0	0	0	0	0	7.375.540.599	0	829.762.248	0	2.501.129.143	0	3.805.985.878	0	5.013.678.524	0	5013678524	0	67,98	0	0	0		
3.X.XX-01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			0	0	0	0	0	7.375.540.599	0	829.762.248	0	2.501.129.143	0	3.805.985.878	0	5.013.678.524	0	5013678524	0	67,98	0	0	0		
			Persentase ketercapaian Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	persen	100		0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	0	0	0	0		
			Persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	persen	100		0	0	0	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	20.000.000	0	1.815.000	0	10.315.000	0	10.581.100	0	37.316.800	0	37316800	0	186,58	0	0	0		
			Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	dokumen	4		0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	20.000.000	0	1.815.000	0	10.315.000	0	10.581.100	0	37.316.800	0	37316800	0	186,58	0	0	0		
			Jumlah laporan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerja yang dilaksanakan	Laporan	12		0	0	0	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	6.324.756.369	0	727.986.012	0	2.306.773.725	0	3.456.183.360	0	4.307.678.367	0	4307678367	0	68,11	0	0	0		
			Persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	persen	100		0	0	0	100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			0	0	0	0	0	6.081.808.369	0	673.827.012	0	2.218.493.125	0	3.303.153.460	0	4.099.509.567	0	4099509567	0	67,41	0	0	0		
			Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan pns	Bulan	12		0	0	0	48	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			0	0	0	0	0	242.948.000	0	54.159.000	0	88.280.600	0	153.029.900	0	208.168.800	0	208168800	0	85,68	0	0	0		
			Jumlah bulan terbayarnya honor penatausahaan keuangan	Bulan	12		0	0	0	12	0	3	0	3	0	3	0	3	0	12	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0	0	0	0	0	89.623.000	0	0	0	23.440.000	0	23.440.000	0	52.310.000	0	52310000	0	58,37	0	0	0		
			Persentase terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	persen	100		0	0	0	100	0	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			0	0	0	0	0	32.433.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Jumlah pakaian dinas bagi pegawai BKPP	Stel	58		0	0	0	57	0	0	0	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0	0		
X.XX-01.2.05.10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			0	0	0	0	0	57.190.000	0	0	0	23.440.000	0	23.440.000	0	52.310.000	0	52310000	0	91,47	0	0	0		

*) coret yang tidak perlu

*) Diisi oleh Kepala BAPPELBANGDA

Disusun
-
PLT. KEPALA BAPERLITBANG
Kabupaten Kendal

Dievaluasi
-
BUPATI KENDAL
Kabupaten Kendal

ABDUL WAHAB, S.SOS, MIDS, M.ENG
197310021 199703 1 002

DICO M. GANINDUTO, B.SC